



CAPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT TERTINGGI

Anggaran Harus Berbasis Kinerja

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali mendapatkan penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Bahkan, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014, hasil penyusunan dan penyajiannya mendapatkan nilai tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Indonesia.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brojonegoro dan diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (2/10). "Sebenarnya untuk opini WTP, Pemkot Yogyakarta sudah berhasil enam kali berturut-turut. Tapi bagi kami, justru menjadi tantangan, ungkap Imam usai menerima penghargaan.

Menurut Imam Priyono, materi rapat kerja nasional tersebut jauh lebih penting. Pasalnya, setiap daerah baik di tingkat kementerian hingga badan yang sudah meraih opini WTP, diimbau menggunakan sistem anggaran berbasis akrual. Basis akrual tersebut merupakan metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Selama ini, anggaran masih berbasis kas sehingga pencatatan baru dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, imbuhan Imam Priyono, melalui basis akrual maka anggaran harus berbasis kinerja, bukan sebaliknya. "Kami akan gencarkan dulu sosialisasi di tiap instansi supaya tidak kaget. Sumber daya manusia dan infrastruktur akan langsung disiapkan. Bagaimanapun, basis akrual mengedepankan transparansi dan keterbukaan menjadi kunci utama.

Kinerja lebih terukur dan bisa dievaluasi sewaktu-waktu," paparnya.

Selain itu, kegiatan anggaran yang mengalami kelebihan bayar maupun kekurangan bayar, dapat langsung diketahui saat itu juga. Hal ini mampu menghindarkan dari celah kebororan anggaran sehingga dapat terserap maksimal untuk masyarakat.

Terkait opini WTP hingga enam kali berturut-turut, menurut Imam Priyono, menjadi bukti jika Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik. Akan tetapi, diakuinya, mempertahankan WTP bukan perkara mudah. Pengawasan antarinstansi, khususnya dalam pelaporan keuangan, akan terus dioptimalkan.

Namun demikian, tidak hanya sistem akuntansi dan keuangan yang menjadi pengawasan Inspektorat. Melainkan seluruh aset dan pengelolaan barang dari tingkat dasar hingga pengguna anggaran. (Dhi)-k



Imam Priyono usai menerima penghargaan.

Instansi	Nilai Berita		
1. DPDPK	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> An	
2.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005